

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat suatu aspek dinamis dari suatu perekonomial, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanan ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. (Radenintan.2013).

Menurut Adam Smith pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara.

Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu: (i) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada

tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia; (ii) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; (iii) kemajuan teknologi. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. (Ma'ruf 2012).

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang ingin mencoba untuk dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari negara lain. Tentu hal ini pernah dicoba namun ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasny arus globalisasi yang terus berkembang cepat. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia akhirnya terpaksa harus mengikuti arus tersebut, yaitu mencoba membuka diri dengan menjalin kerja sama dengan negara lain demi terlaksananya pembangunan nasional terutama dari sendi ekonomi nasionalnya.

Awal mula utang indonesia di era kepemimpinan soekarno diawal kemerdekaan, Indonesia sudah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,3 miliar dolar AS. Warisan utang tersebut merupakan salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia, Belanda, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) atau

yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Indonesia menganut perekonomian terbuka dimana dalam menjalankan perekonomiannya pemerintah tidak luput akan adanya interaksi dari pihak swasta ataupun negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tentu memerlukan pembiayaan yang cukup untuk membangun perekonomian yang merata dan sejahtera bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan, yang pada akhirnya akan dipergunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan (Dion Maulana, 2016)

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara.

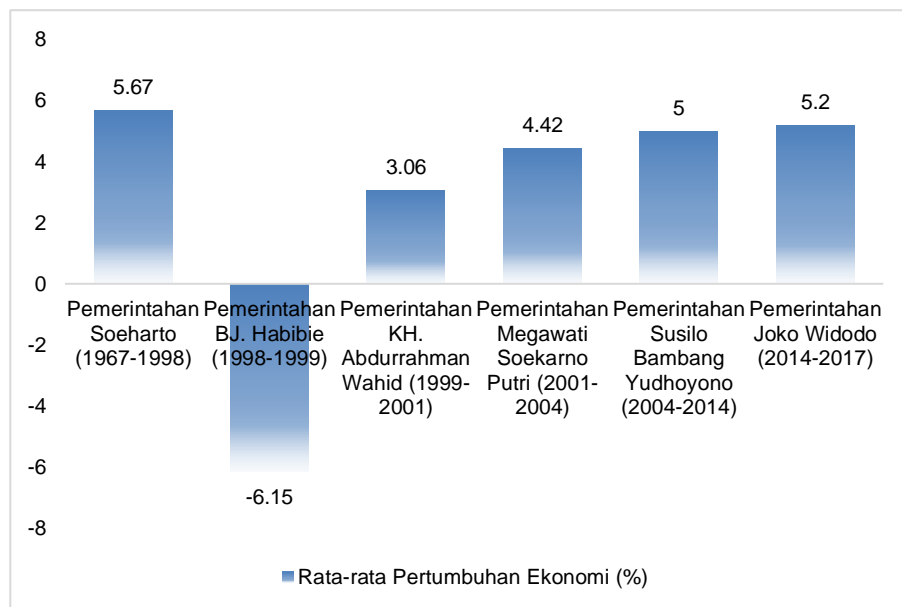
Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (*National Income*). Definisi PDB yaitu seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah atau negara. (Dion Maulana, 2016)

Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang berdampak buruk bagi negara dan rakyatnya. Guncangan ekonomi tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun drastis. Krisis moneter yang berlangsung berubah menjadi krisis ekonomi, menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi yang membuat banyak pekerja yang menganggur. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak sepenuhnya terjadi karena krisis moneter saja, namun juga musibah lainnya yang muncul di tengah kesulitan ekonomi di antaranya gagal panen padi selama 50 tahun terakhir. Krisis moneter yang terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu di pandang cukup kuat dan di sanjung oleh Bank Dunia (Tarmidi, 1998).

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, namun pada saat perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar - 13,1%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun pada masa sebelum krisis moneter tahun

1998 lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun setelah krisis moneter tahun 1998. Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1986 sampai dengan tahun 2010.

*Grafik: 1.1 Pertumbuhan ekonomi per Periode*



*Sumber: Bank dunia*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari pemerintahan Soeharto sebelum krisis moneter mencapai 5.67 persen di akhir tahun 1998. diakhir tahun 1999 pada masa pemerintahan BJ. Habibie pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh dibawah satu persen yakni -6.15 persen. Setelah pemerintahan berganti kepada Presiden KH. Abdurrahman Wahid diakhir tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 3,06 persen. Setelah itu dimasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 4.42 persen diakhir tahun 2004. Pada Pemilu 2004 yang memenangkan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono yang mengantarkan beliau menjadi Presiden selama satu dekade atau dua periode, diakhir periode kedua ditahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh 5 persen. pada tahun 2017 masa pemerintahan Joko Widodo pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 5,2 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada masa sebelum krisis moneter tahun 1998 menempatkan Indonesia sebagai salah satu macan Asia. Kenapa disebut sebagai macan asia karena macan asia merupakan julukan yang ditujukan kepada negara-negara di asia yang mampu membangun perakonomian yang kuat. Ciri yang tampak adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata dua digit untuk waktu yang lama menjadikan negera industry yang maju sebagai sasaran ekspor dan neraca perdagangan dengan negara maju, sehingga hasil Harga-harga barang dan jasa pada perekonomian Indonesia beberapa tahun sebelum krisis moneter tahun 1998 relatif stabil.

Untuk dapat meningkat pertumbuhan ekonomi, maka harus diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yakni utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan sedangkan penanaman modal asing bisa menambah pemasukan negara.

Utang luar negeri merupakan konsekuensi biaya yang harus dibayar sebagai akibat pengelolaan perekonomian yang tidak seimbang, ditambah lagi proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan

konsisten. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah telah meningkat drastis. Sehingga, pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia.

Untuk dapat meningkat pertumbuhan ekonomi, maka harus diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yakni utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan sedangkan penanaman modal asing bisa menambah pemasukan negara.

Utang ini sudah begitu berat mengingat pembayaran cicilan dan bunganya yang begitu besar. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar sehingga biaya untuk kepentingan-kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak menjadi sangat minim yang berimplikasi sangat luas. Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, yang memiliki ciri-ciri dan persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang hampir sama dengan negara berkembang lainnya, Indonesia sendiri tidak terlepas dari masalah utang luar negeri, dalam kurun waktu 25 tahun



terakhir, utang luar negeri telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan di Indonesia.

Meskipun utang luar negeri (*foreign debt*) sangat membantu menutupi kekurangan biaya pembangunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun persoalan pembayaran cicilan pokok dan bunga menjadi beban yang terus menerus yang harus dilaksanakan, apalagi nilai kurs rupiah terhadap dollar cenderung tidak stabil setiap hari bahkan setiap tahunnya.

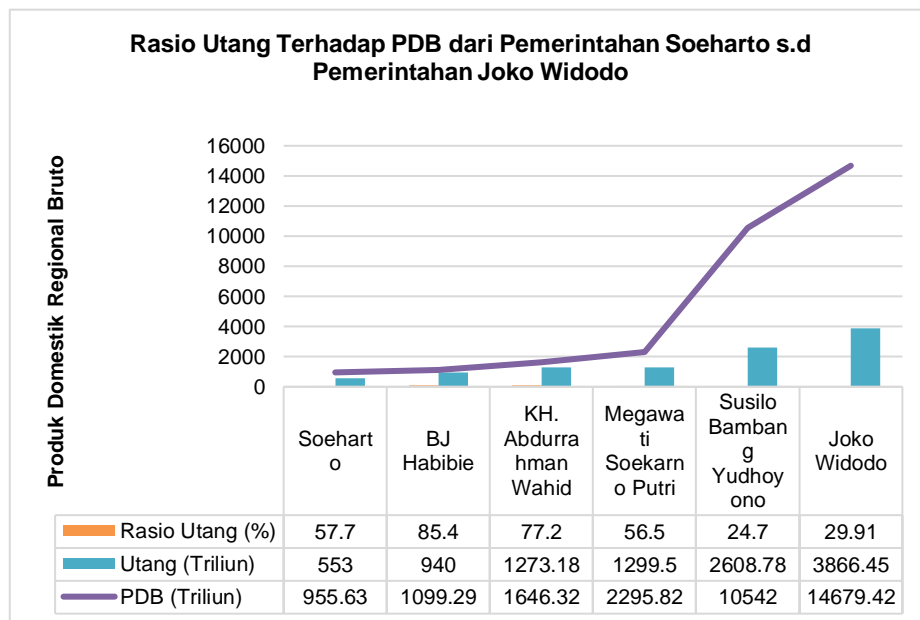
Sejak zaman Soekarno menjadi presiden Indonesia hingga sudah berganti berkali-kali presiden lembaga donor internasional World Bank selalu setia menggerojoki utang sejak World Bank atau Bank Dunia telah aktif di Indonesia pada tahun 1967. Saat itu Indonesia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk menandai pembangunan.

Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam dengan sumber daya alam yang melimpah tentunya sebagai generasi penerus harus bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Sehingga, bisa dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidup untuk generasi yang akan datang tanpa mewariskan utang.

Sejak krisis dunia pada awal tahun 1980-an, masalah utang luar negeri banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia semakin memburuk. Negara-negara tersebut semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri, walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara itu.

Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara tersebut belum berarti bahwa pada negara-negara tersebut dengan sendirinya telah dapat dikategorikan menjadi sebuah negara yang maju, dalam arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap. Sebab pada kenyataannya, besar-kecilnya jumlah utang luar negeri yang dimiliki oleh banyak negara yang sedang berkembang lebih disebabkan oleh adanya defisit *current account*, kekurangan dana investasi pembangunan yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana di dalam negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisienan struktural di dalam perekonomiannya.

Grafik: 1.2 Rasio utang terhadap PDB per periode



Sumber: Hasil olahan penulis, 2019

Rasio Utang Terhadap PDB dari Pemerintahan Soeharto s.d Pemerintahan Joko Widodo Dari pemerintahan Soeharto diakhir tahun

1998 utang pemerintah mencapai Rp. 553 Triliun dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 57,7 persen. Setelah kepemimpinan Soeharto berakhir, maka di masa pemerintahan BJ. Habibie utang pemerintah naik mencapai Rp. 940 Triliun dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 85,4 persen. Dimasa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik indonesia utang yang dibuat oleh pemerintah mencapai. Rp 1.273,18 Triliun dengan rasio utang mencapai 77,2 yang artinya menurun dari rasio pemerintahan BJ. Habibie. Setelah pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia di jabat oleh Megawati Soekarno Putri, di masa pemerintah Megawati utang pemerintah yang dicetak sejumlah Rp. 1.299, 5 Triliun yang rasio utang terhadap PDB turun menjadi 56,5 persen. Diakhir tahun 2014 masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono utang yang didapat mencapai Rp. 2.608, 78 Triliun dan rasio utang juga menurun menjadi 24,7 persen terhadap PDB. Diakhir tahun 2018 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo utang yang dibuat oleh pemerintah adalah Rp. 3.866, 45 Triliun dengan rasio utang mencapai 29,91 persen terhadap PDB.

Perkembangan rasio pajak Indonesia dari tahun 2010 hingga 2017, maka rasio pajak di indonesia yang merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto mengalami fluktuasi. Rasio pajak indonesia di tahun 2010 mencapai 12,9 persen meningkat sampai diakhir tahun 2012 yang mencapai 14 persen namun terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 10,7 persen. Penurunan

rasio pajak di Indonesia juga berakibat pada penerimaan negara yang telah direncanakan, semakin kecil rasio pajak maka kemampuan Indonesia membiayai dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi semakin tidak baik bagi perekonomian negara. Kecilnya rasio pajak yang berimbas pada pendapatan negara mengakibatkan defisit APBN dan memaksa pemerintah untuk menarik pembiayaan guna menutupi defisit yang terjadi. Pembiayaan yang dimaksud adalah dengan melakukan pinjaman terhadap lembaga-lembaga internasional untuk membiayai program-program yang telah disusun dalam kerangka acuan ekonomi makro seperti pembangunan infrastruktur, menurunkan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan yang masih mendominasi di Indonesia.

Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 memberikan kontribusi yang besar terhadap pembengkakan utang luar negeri pemerintah Indonesia. Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, akumulasi utang luar negeri merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal tersebut dikarenakan tabungan domestik yang rendah yang menyebabkan investasi menurun yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan

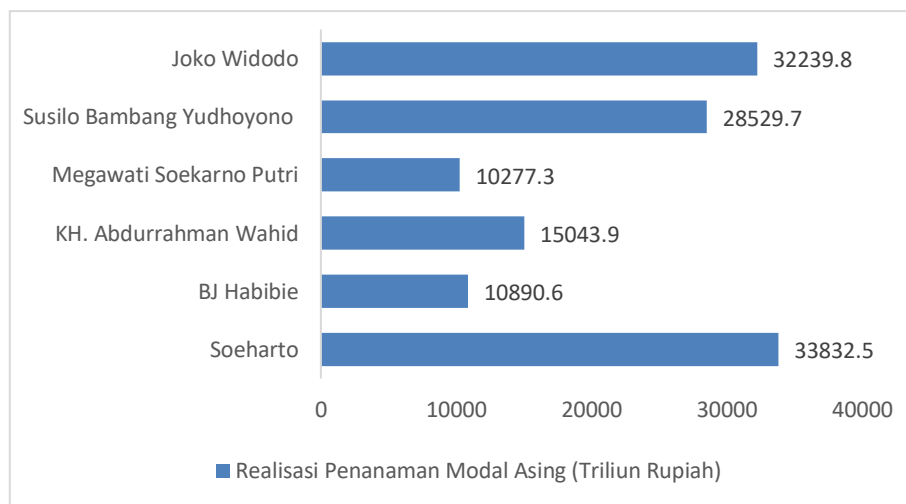
suatu usaha berkelanjutan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun lambat laun utang luar negeri seolah-olah menjadi bumerang bagi Indonesia karena meninggalkan banyak permasalahan terutama utang luar negeri yang mempunyai bunga yang sangat tinggi. Pembayaran utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Sedangkan negara kita masih harus membiayai berbagai sektor perekonomian lainnya yang sangat penting dan mendesak.

Sebelum krisis moneter pada tahun 1998, penanaman modal asing (PMA) masih relative kecil dibandingkan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri (PMDN), yaitu 30% berasal dari PMA dan 70% sisanya berasal dari PMDN. Sebaliknya sesudah krisis, kontribusi investasi PMA lebih tinggi dibandingkan PMDN, yaitu 70% dari total investasi PMA dan sisanya dari PMDN. Terjadinya perubahan perbandingan PMA dan PMDN ini lebih disebabkan oleh adanya depresiasi rupiah terhadap dolar dari Rp 2.909,3 per dolar tahun 1997 menjadi Rp 10.013,6 per dolar sehingga nilai PMA yang dirupiahkan menjadi lebih besar.

Jika dilihat dari besarnya nilai PMA, terjadi penurunan nilai nominal investasi asing akibat krisis moneter. Pada tahun 1997 nilai persetujuan PMA mencapai titik tertinggi yaitu sebesar US\$ 33.663.682 (dalam ribuan) bahkan realisasi investasi asing ini melebihi realisasi investasi di Cina

(Subroto, 2007). Negara investor tertinggi adalah Inggris yang menyumbang sebesar 16,18% dari total investasi di Indonesia, kemudian disusul oleh Jepang dan Jerman masing-masing 16,02% dan 13,20%. Pada puncak krisis tahun 1998 nilai nominal PMA turun drastis ke level US\$ 13.635.791 (dalam ribuan) dan pada tahun 2006 mulai menunjukkan perbaikan investasi menjadi US\$ 15.645.782,35 (dalam ribuan). Nilai investasi pada tahun 2008 tersebut disumbang oleh meningkatnya sektor industri komunikasi terutama di luar Jawa, sebagai akibat perubahan kurs dolar yang meningkatkan pendapatan masyarakat dari komoditas ekspor.

Grafik 1.3 Penanaman Modal Asing per Periode



Sumber: Bank Dunia

pada masa pemerintahan soeharto realisasi penanaman modal asing indonesia di akhir tahun 1997 mencapai Rp 33832,5 triliun. Pada masa pemerintahan Bj Habibie realisasi penanaman modal asing indonesia di akhir tahun 1999 mencapai Rp 10890.6 triliun. Pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid realisasi Penanaman modal asing indonesia di akhir tahun 2001 mencapai Rp 15043.9 triliun. Pada masa

pemerintahan Megawati Soekarno Putri realisasi penanaman modal asing di akhir tahun 2004 mencapai Rp 10277.3 triliun. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono realisasi penanaman modal asing Indonesia di akhir tahun 2014 mencapai Rp 28529.7 triliun. Dan pada masa pemerintahan Joko Widodo realisasi penanaman modal asing Indonesia di akhir tahun 2017 mencapai Rp 32239.8 triliun.

Sementara Arus masuk modal asing (*capital inflows*) juga berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (*saving investment gap*) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Beberapa negara bahkan tercatat “aktif” dalam hal memberikan bantuan berupa pinjaman kepada Indonesia, baik di Asia, Eropa bahkan Amerika Serikat serta beberapa lembaga keuangan internasional lainnya.

Indonesia merupakan negara “favorit” bagi para kreditor karena dibalik pinjaman luar negeri juga tersebut, tersirat kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya mempengaruhi arah kebijakan moneter dan fiskal Indonesia.

Sehubungan dengan uraian di atas, menunjukkan bahwa penelitian tentang **“Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 1988 / 2017”** sangat penting untuk dilakukan dalam pengembangan ekonomi makro pada masa yang akan datang.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari pernyataan pada latar belakang diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan refensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa dalam penelitian, serta sebagai bahan untuk pengembangan ilmu dalam bidang utang luar negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pemegang wewenang dalam merumuskan kebijakan atau keputusan terkait pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam upaya kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan tepat.